

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Devita, Irma. 2010. *Hukum Pertanahan*. PT. Mizan Pustaka. Bandung.
- Fauzi, Noer. 1997. *Tanah dan Pembangunan Risalah dan Konferensi INFID ke-10*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- , 1998. *Perubahan Politik Agraria dan Penguatan Institusi Rakyat: Dua Ranah Agenda Pembaruan Agraria, dalam "Usulan Revisi Undang-Undang Pokok Agraria: Menuju Penegakan Hak-Hak Rakyat Atas Sumber Sumber Agraria,"* KRHN. Bandung
- Harsono, Boedi, 1997, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya; Jilid I, Hukum Tanah Nasional*. Djambatan: Jakarta.
- Hasibuan, Effendy. 1997. *Dampak Pelaksanaan eksekusi Hipotik dan Hak Tanggungan Terhadap Pencairan Kredit Macet Pada Perbankan di Jakarta*. Jakarta: Laporan Penelitian Universitas Indonesia Pascasarjana (S3) Bidang Studi Ilmu Hukum.
- Harsono, Boedi, 2002. *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan PeraturanPeraturan Hukum Tanah*. Jakarta : Djambatan.
- Lutfi Hakim Nasution, 2004. "Badan Pertanahan Nasional. Djambatan Jaakarta
- Mardalis. 2008. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Bumi Aksara.

Jakarta

Soemitro, Roni Hanitijo.1988.*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri.*

Jakarta:Ghalia Indonesia.

Soekamto, Soejono.2008. *Pengantar Hukum.* Jakarta :Universitas Indonesia Press.

Wantjik, Saleh K.1992. *Hak Anda Atas Tanah.*Jakarta : Ghalia Indonesia.Hal 18.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh

R. Subekti dan R. Tjitrosubroto, cet. 31, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001).

Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Ijin Lokasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.